

Determinan Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN: Penetrasi Faktor Kunci Melalui Pendekatan *Autoregressive Distributed Lag*

Fiki Afif Jauhari¹ & Miftakhul Choiri²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga¹²

*Corresponding author, e-mail: fikiafifjauhari99@gmail.com

ARTICLE INFO

Received 14 September 2024

Accepted 22 Desember 2024

Published 24 Desember 2024

Keywords: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Populasi, Tata kelola Pemerintah

DOI :

<http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v7i4.16640>

ABSTRACT

This study examines the influence of economic growth, population, and government governance on the Human Development Index (HDI) in ASEAN using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. The findings indicate that, in the long run, both economic growth and governance positively and significantly impact HDI, whereas population has a negative and significant effect. In the short run, economic growth and population positively influence HDI, but governance has no effect. A cross-sectional analysis reveals that, in the short term, economic growth significantly impacts HDI in Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, the Philippines, Myanmar, Cambodia, Brunei, and Laos, but not in Singapore. Additionally, population significantly affects HDI in all ASEAN countries in the short term, while governance impacts HDI only in Vietnam and the Philippines.



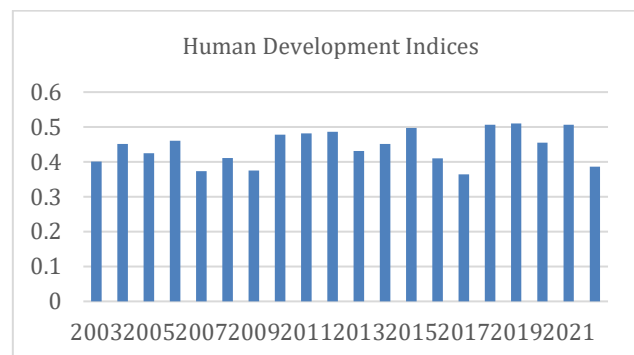
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Pembangunan bukan sekadar tentang peningkatan pendapatan per kapita, melainkan merupakan proses yang lebih kompleks dan multidimensional. Konsep pembangunan mencakup banyak aspek, seperti politik, ekonomi, keamanan, hukum, dan sosial. Setiap dimensi ini saling terkait dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, fokusnya tidak hanya pada peningkatan angka pendapatan, tetapi juga pada perbaikan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan tersebut. Artinya, pembangunan ekonomi melibatkan tidak hanya pertumbuhan angka nominal, tetapi juga transformasi dalam cara sistem bekerja, seperti reformasi lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan kata lain, pembangunan mengharuskan adanya perubahan signifikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas jangka panjang (Arisman, 2018). Oleh karena itu, mengukur pembangunan ekonomi dengan hanya melihat PDB per kapita sebagai indikator

tunggal adalah pendekatan yang tidak lengkap. Pembangunan yang sejati mencakup perubahan dalam struktur sosial, yaitu bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan ekonomi; perubahan dalam sistem kelembagaan, yang memperbaiki cara kerja negara dan pasar; serta perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, yang mendorong penerapan nilai-nilai baru yang lebih selaras dengan tujuan pembangunan (Banik *et al.*, 2023). Semua elemen ini berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan angka-angka pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kemajuan sosial yang bermakna dan berkelanjutan. Sarkar *et al.* (2012) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat pembangunan suatu negara. Pembangunan manusia dapat diukur dengan melihat indeks pembangunan manusia yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* atau disebut UNDP (Sehrawat & Giri, 2014).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator penting yang mengukur kesejahteraan manusia secara holistik melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, mengevaluasi kinerja pembangunan, dan membandingkan kemajuan antar negara. Selain itu, IPM meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pembangunan manusia, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menyoroti ketidaksetaraan. Dengan demikian, IPM berperan krusial dalam mendorong pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Banik *et al.*, 2023).



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN 2003-2022

Sumber : *United Nations Development Programme (UNDP)*, diolah 2024

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa indeks pembangunan manusia di ASEAN dari tahun 2003 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada periode 2003 hingga 2009, terjadi peningkatan IPM dari 0,400694 pada tahun 2003 ke 0,460486 pada tahun 2006, namun kemudian menurun drastis pada tahun 2007 dan 2009 ke nilai 0,373333 dan 0,375. Pada periode 2010 hingga 2012, IPM mengalami peningkatan signifikan dari 0,477639 pada tahun 2010 ke 0,485833 pada tahun 2012. Selanjutnya, antara tahun 2013 dan 2016, terdapat fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2013 ke 0,431111, sedikit peningkatan pada tahun 2014, dan penurunan kembali pada tahun 2016 ke 0,410486. Pada tahun 2017 hingga 2019, IPM turun lagi menjadi 0,364028 pada tahun 2017, namun mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2018 dan

2019 mencapai nilai 0,510278. Pada periode 2020 hingga 2022, IPM sedikit menurun pada tahun 2020 ke 0,454792 namun kembali naik pada tahun 2021 ke 0,506111. Akan tetapi, pada tahun 2022, IPM kembali mengalami penurunan signifikan ke 0,386667. Secara keseluruhan, data menunjukkan luktiasi yang cukup besar dalam nilai IPM ASEAN selama periode 2003 hingga 2022. Beberapa tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, sementara tahun-tahun lainnya menunjukkan penurunan yang cukup drastis. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, bencana alam, dan faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pembangunan manusia di kawasan ASEAN. (Arisman, 2018)

Pertumbuhan ekonomi, populasi, dan tata kelola pemerintahan merupakan tiga faktor yang sering dianggap berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia (Idris et al., 2024; Zakaria, 2016). Di kawasan Asia Tenggara, atau yang dikenal dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), hubungan antara ketiga faktor tersebut dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi topik yang menarik untuk diteliti. IPM, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kualitas hidup dan kemajuan pembangunan manusia suatu negara (Ahmad & Saleem, 2014; Arisman, 2018; Pradhan, 2011)

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di ASEAN, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan IPM. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin peningkatan IPM yang merata, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak inklusif dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi (Jones GW., 1992; Tolba, 1992). Menurut Khadijah *et al.* (2022); Maulana & Bowo (2013) pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu wilayah atau negara maka juga akan meningkatkan pembangunan manusia di wilayah atau negara tersebut. Namun menurut Wardana (2016); Zakaria (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Selain itu, faktor penting dalam pembangunan manusia yaitu dengan melihat jumlah penduduk atau populasi di suatu wilayah atau negara. Menurut Jones GW. (1992) dan Tolba (1992) pembangunan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempercepat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum. Dengan laju pertumbuhan yang terkendali, pemerintah dan lembaga dapat lebih mudah merencanakan dan mendistribusikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien. Namun, meskipun pertumbuhan penduduk yang cepat memang menjadi tantangan, hal ini bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih baik. Di banyak negara, termasuk yang berpenghasilan rendah dan sedang, masih ada peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kebijakan, infrastruktur, dan manajemen sumber daya.

Meskipun pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memperlambat laju perkembangan ini, terutama karena lebih banyak orang yang harus dilayani oleh sistem yang terbatas, negara-negara tersebut tetap bisa membuat kemajuan signifikan dengan strategi yang tepat.

Di negara-negara miskin, pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi hambatan yang lebih besar karena sumber daya yang terbatas. Keterbatasan ini mencakup anggaran pendidikan, tenaga pendidik, infrastruktur, serta akses ke materi dan fasilitas belajar. Akibatnya, semakin banyak anak yang lahir, semakin sulit untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua orang. Selain itu, negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi sering kali juga menghadapi masalah-masalah lain seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan akses yang terbatas ke layanan dasar, yang semuanya memperumit upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.. Dampaknya dapat tercermin dalam peningkatan biaya untuk mencapai target pendidikan pendidikan dasar universal atau perpanjangan jangka waktu pencapaian target. Lebih lanjut menurut Arisman (2018) dan Selvia & Idris (2022) populasi yang besar dan terus bertambah dapat memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia. Negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia dan Filipina harus berjuang untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang memadai bagi seluruh penduduknya. Di sisi lain, negara-negara dengan populasi kecil atau menurun juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan tenaga kerja yang produktif dan memastikan kelangsungan ekonomi mereka.

Selain itu, dalam pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sinergi dari pemerintah yang baik sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah yang efektif mampu mengelola pemerintahan dengan baik, termasuk dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Gamlath, 2013). Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisien, memastikan adanya keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (Pradhan, 2011). Menurut Worldwide Governance Indicators (WGI), tata kelola pemerintahan meliputi enam dimensi utama, yaitu partisipasi dan akuntabilitas, stabilitas politik serta ketiadaan kekerasan, keefektifan pemerintahan, kualitas regulasi, supremasi hukum, serta pengendalian korupsi (Handoyo, 2023)

Tata kelola pemerintahan merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan manusia. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan layanan publik (Banik *et al.*, 2023). Tata kelola merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan pembangunan yang makmur di setiap negara, terutama tata kelola yang baik. Supaya dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia yang lebih optimal. Dengan adanya tata kelola yang baik sangat penting didalam perekonomian suatu negara, terkhususnya bagi negara-negara berkembang. Secara umum, tata kelola yang baik memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, stabilitas ekonomi, pendidikan, sistem hukum, kesehatan, serta perlindungan lingkungan. Tata kelola yang efektif juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung pembangunan yang

berkelanjutan. Semua bidang ini merupakan elemen dasar yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai kemajuan. Dengan adanya tata kelola yang kuat, sumberdaya dapat dikelola secara efisien, kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, serta dapat mencapai tujuan pembangunan lebih cepat dan maksimal (Ahmad & Saleem, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tata kelola pemerintahan dengan Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang mana pada penelitian-penelitian terdahulu masih belum ada yang menggabungkan ke empat variabel dalam satu penelitian sehingga peneliti dalam hal ini ingin mencoba menggabungkan ke empat variabel dalam satu penelitian dengan menggunakan objek negara di kawan ASEAN kecuali Timor Leste. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat memberikan dampak terhadap pembangunan manusia di kawasan ASEAN, serta berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, populasi, dan tata kelola pemerintahan dalam konteks IPM, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di ASEAN. Selain itu, diharapkan pula bahwa temuan ini dapat menjadi acuan penting bagi penelitian lebih lanjut, baik dalam skala regional maupun global, yang menitikberatkan pada pembangunan manusia dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data panel yang terdiri dari 10 Negara ASEAN yang meliputi Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Philipina, Laos, Cambodia, Brunei Darussalam dan Myanmar dengan rentang tahun 2003 hingga 2022. Peneliti tidak memasukan negara Timor Leste dalam penelitian dikarenakan kurang lengkapnya data yang ada, sehingga tidak dapat dijadikan sampel penelitian. Variabel dalam penelitian yaitu indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, populasi dan tata kelola pemerintah.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Satuan	Sumber
Indeks pembangunan manusia	1. Pendidikan	Persentase	United Nations Development Programme
	2. Kesehatan		
	3. Pendapatan		
Pertumbuhan ekonomi	Gross domestic Product (GDP) per kapita	USD	World Bank
Populasi	Jumlah penduduk	Nominal	World Bank
Tata kelola pemerintah	1. <i>Voice & Accountability</i>	Persentase	World Bank
	2. <i>Political Stability and</i>		
	3. <i>Lack of Violence,</i>		
	4. <i>Government Effectiveness,</i>		
	5. <i>Regulatory Quality,</i>		
	6. <i>Rule of Law,</i>		
	6. <i>Control of Corruption</i>		

Penelitian ini menggunakan model penelitian *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), dimana model ARDL merupakan model yang memasukkan antara variabel bebas maupun variabel terikat dalam sebuah analisis regresi. Penggunaan metode ARDL karena seringkali ketergantungan antara variabel terikat terhadap variabel bebas sangat sulit ditemukan dalam keadaan konstant (Andiansyah *et al.*, 2022).

$$HDI_t = \beta_0 + \beta_1 GDP_t + \beta_2 POP_t + \beta_3 GOV_t + e_t$$

Kemudian model penelitian ARDL dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta HDI = & \theta_0 + \theta_1 HDI_{t-1} + \theta_1 GDP_{t-1} + \theta_1 POP_{t-1} + \theta_1 GOV_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} \Delta HDI_{t-1} \\ & + \sum_{i=1}^n \alpha_{2i} \Delta GDP_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_{3i} \Delta POP_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_{4i} \Delta GOV_{t-1} + e_t \end{aligned}$$

Keterangan :

HDI : *Human development Index*

GDP : *Gross domestic product*

POP : *Populasi (Jumlah penduduk)*

GOV : *Tata kelola pemerintah*

Panel ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) adalah model regresi linear yang mempertimbangkan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Model ini memungkinkan untuk mempelajari dinamika hubungan antarvariabel dalam data panel, dengan memperhatikan heterogenitas antarindividu atau entitas. Panel ARDL berguna untuk mengestimasi dampak masing-masing variabel secara individual, mengasumsikan bahwa terdapat kointegrasi dalam jangka panjang di antara

variabel-variabel tersebut. Sebelum menggunakannya, perlu dilakukan uji diagnostik seperti uji stasioneritas, pemilihan lag optimum, dan uji kointegrasi untuk memastikan model yang dihasilkan cocok dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maximum, rata – rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	HDI	GDP	POP	GOV
Mean	0.442983	3.30E+14	61390033	43.05933
Median	0.475000	2.86E+14	40231141	40.24291
Maximum	0.659028	9.98E+14	2.76E+08	89.89646
Minimum	0.004167	3.90E+12	350795.0	3.165225
Std. Dev.	0.151244	2.39E+14	72091945	23.05541
Skewness	-1.458783	0.883158	1.703870	0.430522
Kurtosis	5.006798	3.070062	5.195096	2.424811
Jarque-Bera	104.4952	26.03983	136.9261	8.935339
Probability	0.000000	0.000002	0.000000	0.011474
Sum	88.59653	6.59E+16	1.23E+10	8611.866
Sum Sq. Dev.	4.552090	1.14E+31	1.03E+18	105778.8
Observations	200	200	200	200

Sumber : Eviews 10, diolah 2024.

Dari tabel 2 diatas menunjukkan beberapa wawasan penting terkait indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) memiliki rata-rata 0,443, menandakan bahwa secara keseluruhan, tingkat pembangunan manusia di kawasan ini masih relatif rendah. Median HDI yang mencapai 0,475 menunjukkan bahwa separuh dari negara-negara tersebut memiliki nilai di atas angka ini, meskipun terdapat variasi yang signifikan, dengan nilai maksimum 0,659 dan minimum hanya 0,004. Dalam hal Produk Domestik Bruto (GDP), rata-rata mencapai 3,30E+14, mencerminkan ukuran ekonomi yang besar, namun median GDP di angka 2,86E+14 menunjukkan adanya ketidakmerataan ekonomi di antara negara-negara anggota. GDP maksimum tercatat sebesar 9,98E+14, sementara nilai minimum adalah 3,90E+12. Populasi (POP) rata-rata 61.390.033, dengan median 40.231.141, menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah penduduk antar negara. Nilai maksimum populasi di kawasan ini mencapai 276 juta, sedangkan nilai minimum hanya 350.795. Untuk pengeluaran pemerintah (GOV), rata-rata 43,06 dengan median 40,24, menunjukkan perbedaan dalam kebijakan fiskal antar negara, di mana nilai maksimum pengeluaran mencapai 89,90 dan minimum 3,17. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya variasi yang signifikan dalam indikator-indikator pembangunan di negara-negara ASEAN, mencerminkan tantangan dan peluang yang berbeda dalam proses pembangunan.

Uji Stasioner

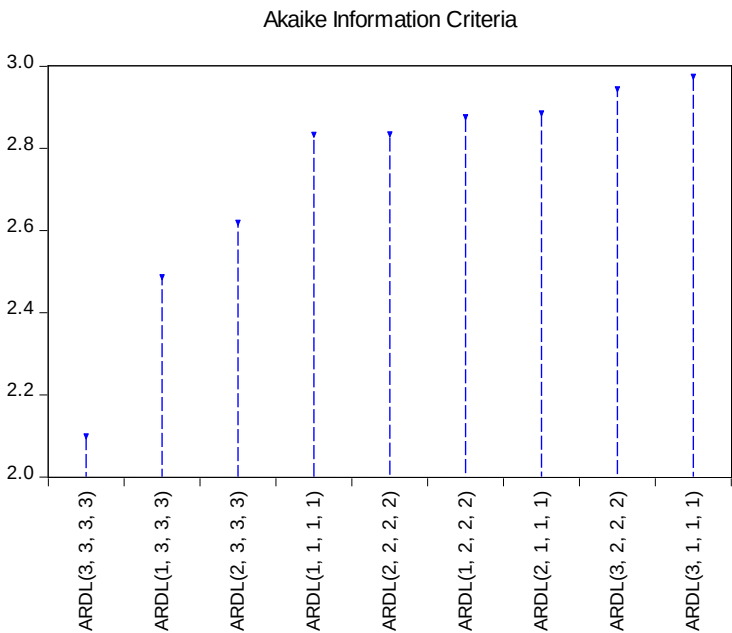
Uji stasioner digunakan untuk menentukan apakah dalam data time series terkandung akar unit yang dapat mempengaruhi validitas analisis. Uji ini memastikan bahwa data tidak memiliki tren yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi bias. Hasil uji stasioner untuk variabel yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Stasioner					
Variabel	Level		First difference		Keterangan
	t-statistik	Prob*	t-statistik	Prob*	
HDI	58,0304	0,0000	108,288	0,0000	Stasioner ditingkat level
GDP	35,3176	0,0182	91,2454	0,0000	Stasioner ditingkat level
POP	32,9743	0,0340	13,5512	0,8525	Stasioner ditingkat level
GOV	22,2908	0,3249	64,2184	0,0000	Stasioner ditingkat First difference

Sumber : Eviews 10, diolah 2024.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa variabel HDI, GDP dan POP stasioner ditingkat level dikarenakan nilai Prob. nya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel GOV ditingkat level tidak stasioner dikarenakan nilai Prob. nya lebih besar dari 0.05, namun stationer ditingkat First difference dikarenakan nilai prob. nya lebih kecil dari 0.05.

Uji Pemilihan Lag Optimum



Gambar 2. Pemilihan Lag Optimum

Sumber : Eviews 10, diolah 2024.

Berdasarkan nilai Akaike Information Criteria (AIC) pada gambar 2, pemilihan lag yang tepat dalam penelitian ini yaitu model ARDL (3.3.3.3) yaitu variabel HDI lag 3, GDP lag 3, POP lag 3 dan variabel GOV lag 3.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Estimasi Panel ARDL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
<i>Long Run Equation</i>				
LGDP	0.213163	0.019236	11.08157	0.0000
LPOP	-7.108142	0.423792	-16.77271	0.0000
LGOV	0.593292	0.054281	10.93009	0.0000
<i>Short Run Equation</i>				
COINTEQ01	-3.303487	1.433142	-2.305066	0.0243
D(LHDI(-1))	1.856768	1.352368	1.372975	0.1743
D(LHDI(-2))	1.507690	1.245478	1.210531	0.2303
D(LGDP)	0.712915	0.269043	2.649817	0.0100
D(LGDP(-1))	0.477506	0.263306	1.813501	0.0742
D(LGDP(-2))	0.414568	0.225943	1.834832	0.0710
D(LPOP)	820.1091	358.6841	2.286439	0.0254
D(LPOP(-1))	-438.8147	322.5823	-1.360318	0.1783
D(LPOP(-2))	176.6912	350.4413	0.504196	0.6158
D(LGOV)	0.020639	1.519123	0.013586	0.9892
D(LGOV(-1))	-0.838852	2.939419	-0.285380	0.7762
D(LGOV(-2))	7.402479	3.528494	2.097914	0.0397
C	-389.8496	173.0437	-2.252896	0.0275

Sumber : Eviews 10, diolah 2024.

Berdasarkan analisis menggunakan estimasi panel ARDL yang ditampilkan dalam Tabel 4, ditemukan bahwa nilai Prob. COINTEQ01 adalah 0.0243, yang berarti lebih kecil dari 0.05. Nilai koefisiennya yang negatif (-3.303487) menunjukkan adanya kointegrasi antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk hasil jangka panjang, nilai probabilitas untuk pertumbuhan ekonomi (GDP) dan Tata Kelola Pemerintah (GOV) masing-masing adalah 0.0000, yang juga lebih kecil dari 0.05. Koefisien keduanya positif, menunjukkan bahwa keduanya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebaliknya, untuk variabel populasi (POP), nilai probabilitas juga 0.0000, tetapi dengan koefisien negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Dalam estimasi jangka pendek, pertumbuhan ekonomi dan populasi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM, karena nilai probabilitasnya di bawah 0.05. Namun, Tata Kelola Pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek, karena nilai probabilitasnya di atas 0.05.

Tabel 5. Cross-section Short run Coefficient

Variabel	IDN	MYS	SGP	THA	VNM
COINTEQ01	-7.2506*** (0.0054)	-26.208*** (0.0001)	-3.3764** (0.0432)	-7.8844*** (0.0043)	-91.114*** (0.0000)
D(LGDP)	12.528*** (0.0000)	11.900** (0.0013)	1.5500 (0.2189)	91.675*** (0.0000)	140.932*** (0.0000)
D(LPOP)	0.0024 (0.9982)	-0.0350 (0.9742)	0.0020 (0.9985)	0.0171 (0.9874)	0.01043 (0.9923)
D(LGOV)	-0.0530 (0.9610)	-0.1583 (0.8843)	-0.0254 (0.9813)	-0.6496 (0.6522)	-3.5219** (0.0389)
Variabel	PHL	MMR	KHM	BRN	LAO
COINTEQ01	-68.5000*** (0.0000)	-8.5946** (0.0033)	-2.0012 (0.1392)	-3.0853* (0.0541)	-1.7411 (0.1800)
D(LGDP)	4.3141* (0.0516)	10.3141*** (0.0019)	2.8713* (0.0640)	5.2085** (0.0138)	8.7362** (0.0032)
D(LPOP)	0.0081 (0.9940)	0.0055 (0.9959)	0.0036 (0.9973)	0.0012 (0.9991)	0.0021 (0.9981)
D(LGOV)	0.0090 (0.9933)	10.8585*** (0.0017)	0.3395 (0.7555)	0.0307 (0.9774)	0.8583 (0.4538)

Keterangan: *** sig 1%, ** sig 5% * sig 10%

Sumber : Eviews 10, diolah 2024

Pengujian jangka pendek pada masing-masing negara (tabel 5), diketahui bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia baik di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Myanmar, Cambodia, Brunei DS maupun Laos, namun tidak berpengaruh di negara Singapura. Selanjutnya populasi dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di masing-masing negara ASEAN. Sedangkan Tata kelola pemerintah dalam jangka pendek hanya berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Vietnam dan juga Philipina.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi secara positif indeks pembangunan manusia di ASEAN. Hal ini menandakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN maka akan dapat meningkatkan pembangunan manusia di ASEAN. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, negara memperoleh sumber daya tambahan yang dapat diinvestasikan ke dalam sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika pendapatan nasional meningkat, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik ke fasilitas-fasilitas ini (Maulana & Bowo, 2013)

Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita juga memungkinkan individu dan keluarga untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya mereka untuk kebutuhan kesehatan

dan pendidikan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, seperti pemeriksaan medis rutin, obat-obatan, dan perawatan kesehatan lainnya. Mereka juga dapat menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan, baik melalui biaya sekolah, kursus tambahan, atau pendidikan tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. (Kebede *et al.*, 2024)

Pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada perkembangan infrastruktur. Dengan ekonomi yang berkembang, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya meningkat. Infrastruktur yang lebih baik ini tidak hanya mempermudah akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jalan yang baik, misalnya, memungkinkan akses yang lebih cepat dan lebih aman ke rumah sakit dan sekolah (Fadila & Marwan, 2020). Selain itu, infrastruktur yang berkembang juga mendukung lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk hidup, yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya meningkatkan pendapatan dan akses terhadap layanan penting, tetapi juga memperbaiki infrastruktur, yang bersama-sama berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bahasoan *et al.* (2019); Kuswanto (2021); Sezgin & Budak (2022) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun pendek. Arisman (2018) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kawasan ASEAN.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pada pengujian hipotesis diketahui bahwa jumlah penduduk dalam jangka panjang berpengaruh negatif sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di ASEAN. Peningkatan jumlah penduduk dalam jangka panjang cenderung berdampak negatif pada pembangunan manusia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama tekanan yang semakin besar pada sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja (Arizal & Marwan, 2019). Ketika populasi meningkat pesat tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, sektor-sektor vital ini bisa mengalami kemunduran. Misalnya, dengan lebih banyak anak yang harus disekolahkan, fasilitas pendidikan bisa menjadi terlalu padat dan kualitas pendidikan menurun. Demikian juga, sistem kesehatan bisa kewalahan melayani populasi yang terus bertambah, dan pasar kerja bisa mengalami kelebihan tenaga kerja sehingga meningkatkan tingkat pengangguran (Jones GW., 1992)

Sebaliknya, dalam jangka pendek, peningkatan jumlah penduduk dapat membawa dampak positif bagi pembangunan manusia. Ini terutama karena adanya potensi tenaga kerja yang lebih besar dan kontribusi ekonomi yang lebih tinggi. Ketika populasi meningkat, terutama di kelompok usia produktif, dapat terjadi peningkatan dalam kapasitas produksi dan inovasi (Tolba, 1992). Lebih banyak orang yang bekerja dapat meningkatkan output ekonomi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Populasi yang lebih besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan inovasi. Selain itu, keuntungan demografi seperti angkatan kerja yang lebih besar dapat memberikan dorongan

bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Dengan manajemen yang baik, peningkatan populasi ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan pembangunan manusia dalam jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jones GW. (1992); Selvia & Idris (2022); Zakaria (2016) yang menyatakan bahwa populasi yang tinggi dapat menurunkan kualitas indeks pembangunan manusia disuatu wilayah atau negara. Selain itu Arisman (2018) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kawasan ASEAN

Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengujian hipotesis, ditemukan bahwa tata kelola pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam jangka panjang, tetapi tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam jangka pendek. Dalam konteks jangka panjang, tata kelola yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan partisipasi publik, stabilitas politik, dan penyediaan layanan dasar yang efisien. Kualitas peraturan yang baik, penegakan hukum yang adil, dan upaya pengendalian korupsi menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efektif. Hal ini, pada gilirannya, berperan penting dalam meningkatkan IPM secara keseluruhan. Namun, dalam jangka pendek, dampak positif dari tata kelola yang baik belum terlihat signifikan karena perubahan struktural dan kebijakan memerlukan waktu untuk diimplementasikan dan menunjukkan hasil nyata. Sistem pemerintahan dan masyarakat juga memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan baru, sehingga efek positif dari perbaikan tata kelola baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun hasil jangka pendek mungkin tidak segera terlihat, penting untuk terus fokus pada peningkatan tata kelola sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad & Saleem (2014); Gamlath, 2013; Linawati *et al.* (2021); Sehwat & Giri (2014) yang menyatakan tata kelola pemerintah yang baik dapat meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, dan tata kelola pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara-negara ASEAN menggunakan pendekatan ARDL. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM, sementara populasi berpengaruh negatif dan signifikan. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi dan populasi menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM, tetapi tata kelola pemerintah tidak memiliki dampak yang signifikan. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi berkontribusi secara signifikan terhadap IPM di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei, dan Laos, namun tidak berpengaruh di Singapura. Di sisi lain, populasi dalam jangka pendek tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM di semua negara ASEAN. Sementara itu, tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap IPM di Vietnam dan Filipina dalam jangka pendek

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara-negara ASEAN, kebijakan harus difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan tata kelola

pemerintahan, dan pengelolaan dampak pertumbuhan populasi. Negara-negara ASEAN perlu mendorong investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki transparansi dan efisiensi pemerintahan untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Selain itu, pengelolaan pertumbuhan populasi melalui perencanaan keluarga dan pemerataan akses terhadap layanan dasar sangat penting. Negara-negara yang menghadapi tantangan tata kelola atau pengaruh terbatas dari pertumbuhan ekonomi harus fokus pada reformasi sektor publik dan kolaborasi regional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mencapai pembangunan yang lebih baik.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperdalam analisis mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti akses terhadap teknologi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Penelitian juga bisa mengkaji peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah, serta dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Selain itu, pendekatan analitis lain seperti model dinamis atau evaluasi kebijakan berbasis studi kasus di negara-negara ASEAN dapat memberikan wawasan lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan pembangunan manusia di tingkat nasional dan regional.

REFERENSI

- Ahmad, Z., & Saleem, A. (2014). Impact Of Governance On Human Development. *Pakistan Journal Of Commerce And Social Sciences (Pjcss)*, 8(3).
- Arisman, A. (2018). Determinant Of Human Development Index In Asean Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.15408/Sjie.V7i1.6756>
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433. <https://doi.org/10.24036/Jmpe.V2i3.7414>
- Bahasoan, A. N., Khaldun, R. I., & Rahmat, A. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Banik, B., Roy, C. K., & Hossain, R. (2023). Healthcare Expenditure, Good Governance And Human Development. *Economia*, 24(1), 1–23. <https://doi.org/10.1108/Econ-06-2022-0072>
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120. <https://doi.org/10.24036/Jmpe.V3i1.8531>
- Gamlath, S. (2013). The Governance Dimension Of Human Development. *Humanomics*, 29(4), 240–259. <https://doi.org/10.1108/H-03-2013-0015>
- Handoyo, S. (2023). Worldwide Governance Indicators: Cross Country Data Set 2012–2022. *Data In Brief*, 51, 109814. <https://doi.org/10.1016/J.Dib.2023.109814>
- Idris, Z. I., Mu'jizat, P., & Husain, A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ecogen*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.24036/Jmpe.V7i1.15244>
- Jones Gw. (1992). Population And Human Resources Development. *Asia Pac Popul J.*, 7(2).
- Kebede, S., Getachew, Z., Kuma, B., & Abebe, T. (2024). The Role Of Fdi Augmented With Governance And Human Capital On Structural Transformation: Experiences From Ssa

- And Eap Countries. *Transnational Corporations Review*, 16(2), 200055. <https://doi.org/10.1016/J.Tncr.2024.200055>
- Khadijah, S., Saharudddin, S., Anwar, K., & Murtala, M. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.29103/Jaie.V1i1.8899>
- Kuswanto, . (2021). The Impact Of Economic Growth On The Human Development Index In Jambi Province In 2004-2019. *Asian Journal Of Economics, Business And Accounting*, 22–28. <https://doi.org/10.9734/Ajeba/2021/V21i1230449>
- Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, M. G. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang Oki. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/Jt.V4i2.12547>
- Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di Indonesia 2007-201*.
- Pradhan, R. P. (2011). Good Governance And Human Development: Evidence Form Indian States. *Journal Of Social And Development Sciences*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.22610/Jsds.V1i1.622>
- Sehrawat, M., & Giri, A. K. (2014). The Relationship Between Financial Development Indicators And Human Development In India. *International Journal Of Social Economics*, 41(12), 1194–1208. <https://doi.org/10.1108/Ijse-11-2013-0268>
- Selvia, N., & Idris, I. (2022). The Effect Of Human Development Index (Hdi), Population, And Labor Force Participation On Economic Growth In Asean. *Proceedings Of The 1st International Conference On Economic And Education, Icon 2021, 14 - 15 December 2021, Padang-West Sumatra, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/Eai.14-12-2021.2318369>
- Sezgin, F., & Budak, Y. (2022). İnsani Gelişmişliğin Büyüme Etkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması. *Istanbul Journal Of Economics / Istanbul İktisat Dergisi*, 0(0), 0–0. <https://doi.org/10.26650/Istjecon2021-1070420>
- Tolba, M. K. (1992). Population Growth And Human Development. In M. K. Tolba, *Saving Our Planet* (Pp. 177–186). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-011-2278-8_16
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12.
- Zakaria, R. (2016). *Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016*.